

**PERAN ORGANISASI DALAM KEMANDIRIAN EKONOMI DAN
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN EKONOMI ANGGOTA
(STUDI DI PD PEMUDA PANCA MARGA DKI JAKARTA)**

***THE ROLE OF ORGANIZATIONS IN ECONOMIC INDEPENDENCE AND
IMPROVING MEMBERS' ECONOMIC WELFARE
(STUDY AT PD PEMUDA PANCA MARGA DKI JAKARTA)***

Robinson Patty¹

¹ PD Pemuda Panca Marga Provinsi Sulawesi Tenggara

*Email Koresponden : Robinpatty72@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini untuk menganalisis peran organisasi Pemuda Panca Marga DKI Jakarta dalam memberdayakan anggota untuk kemandirian ekonomi dan peningkatan kesejahteraan ekonomi Anggota. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dan telah dilaksanakan di Provinsi DKI Jakarta dengan PD Pemuda Panca Marga sebagai objek utama selama satu bulan, yakni dari April hingga Mei 2025. PD Pemuda Panca Marga DKI Jakarta memainkan peran penting dalam mendorong kemandirian ekonomi serta peningkatan kesejahteraan anggotanya dengan beberapa upaya pemberdayaan ekonomi dengan pendirian Koperasi Resimen IX dalam memberikan pelatihan keterampilan, dan pengembangan jejaring sosial dalam memasarkan produk anggota, organisasi ini berupaya memandirikan secara ekonomi anggota dan diharapkan berdampak pada peningkatan kesejahteraan anggota. Kemandirian finansial dan ekonomi anggota akan mendorong kemandirian secara finansial organisasi serta menciptakan eksistensi PPM DKI Jakarta di tengah masyarakat.

Kata Kunci : Eksistensi, Kemandirian, Organisasi, Pemuda Panca Marga, Kesejahteraan Ekonomi

ABSTRACT

This study is to analyze the role of the Pemuda Panca Marga DKI Jakarta organization in empowering members for economic independence and improving the economic welfare of members. This study uses a qualitative approach, and has been implemented in DKI Jakarta Province with PD Pemuda Panca Marga as the main object for one month, namely from April to May 2025. PD Pemuda Panca Marga DKI Jakarta plays an important role in encouraging economic independence and improving the welfare of its members with several economic empowerment efforts by establishing the Regiment IX Cooperative in providing skills training, and developing social networks in marketing member products, this organization seeks to make members economically independent and is expected to have an impact on improving member welfare. The financial and economic independence of members will encourage the financial independence of the organization and create the existence of PPM DKI Jakarta in the community.

Keywords: Existence, Independence, Organization, Pemuda Panca Marga, Economic Welfare

PENDAHULUAN,

Organisasi sebagai sebuah wadah di mana sekelompok orang berkumpul perlu dipahami dengan baik keberadaannya. Dengan mengenal dan memahami organisasi secara menyeluruh, tujuan yang ingin dicapai dapat lebih mudah terwujud. Mills dan Mills (Ariyanto, 2011) meyakini bahwa organisasi adalah kumpulan khusus manusia yang aktivitasnya terkoordinasi dan terkontrol untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan.

Menurut Reksohadiprodjo & Handoko (2001), organisasi dapat dipahami sebagai: (1) sebuah institusi sosial yang dibentuk secara sadar dan diatur secara sistematis; (2) terdiri atas sekelompok individu yang memiliki pola interaksi tertentu yang telah ditetapkan; (3) memiliki batas-batas yang relatif jelas dan dapat dikenali, serta eksistensinya bersifat cukup permanen; dan (4) dibentuk untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang telah ditentukan sebelumnya.

Pemuda Panca Marga sebagai salah satu organisasi merupakan wadah berkumpulnya anak cucu veteran dan pejuang bangsa yang dibentuk berdasarkan keputusan Kongres IV Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) tahun 1978. Dengan memakai **kode etik veteran yaitu Panca Marga** membuktikan pengesahan organisasi Legiun Veteran Republik Indonesia **memberikan mandat resmi kepada PPM sebagai bagian dari struktur organisasinya (Hasina dan Satyadharma, 2023)**. PPM berdiri sebagai organisasi turunan atau anak organisasi dari LVRI. Hal ini diperkuat melalui Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1980 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga LVRI.

Dalam perjalanannya untuk eksistensi organisasi, PPM membutuhkan kemandirian secara organisasi dalam menjalankan roda organisasi serta perwujudan program yang sudah ditetapkan. Kemandirian ini mencakup kemampuan mengelola sumber daya, pendanaan, dan pengambilan keputusan secara otonom. Tanpa kemandirian, organisasi akan rentan terhadap tekanan eksternal dan kehilangan arah. Kemandirian juga menjadi fondasi dalam pelaksanaan program kerja yang konsisten dan berkelanjutan.

Banyak organisasi berada dalam perpecahan internal dan juga menjadi vakum dalam kegiatan serta hilang eksistensi di tengah masyarakat dikarenakan organisasi itu tidak mandiri secara ekonomi dan tidak mampu memberdayakan para anggotanya masing-masing (Walidain, 2021).

Ketergantungan terhadap bantuan eksternal membuat organisasi rentan ketika sumber tersebut terhenti (Masduki, 2023). Tanpa kemandirian, organisasi tidak mampu membiayai operasional maupun menjalankan program kerja yang telah direncanakan. Lebih jauh lagi, ketika anggota tidak diberdayakan secara ekonomi, mereka kehilangan motivasi untuk aktif berpartisipasi. Akibatnya, semangat kolektif melemah dan solidaritas internal runtuh. Kemandirian ekonomi dan pemberdayaan anggota bukan hanya penopang finansial, tetapi juga menjadi kekuatan sosial yang mempererat hubungan antaranggota dan menumbuhkan rasa kepemilikan terhadap organisasi. Organisasi yang gagal membangun kemandirian dan memberdayakan anggotanya pada akhirnya akan terpinggirkan dan kehilangan relevansi dalam kehidupan masyarakat.

Pada akhirnya banyak organisasi terpaksa melakukan inovasi dan improvisasi dalam mencari pendanaan akibat tidak berdaya dan mandiri secara finansial dalam membiayai operasional organisasi. Beberapa organisasi condong untuk meminta bantuan atau donasi dari pihak lain ataupun sekedar menunggu hibah dari pemerintah dan ada juga beberapa organisasi menggunakan cara-cara model premanisme dalam membiayai organisasi (Pujiastuti et al., 2022).

Sebagai organisasi anak pejuang, pengurus PPM DKI Jakarta dituntut untuk berinovasi dan berimprovisasi dalam membiayai roda organisasi dan eksistensi serta mendorong kemandirian ekonomi anggota secara individu. Upaya itu telah dirintis dengan pendirian Koperasi Resimen IX dibawah Bidang Ekonomi Kepengurusan PD PPM DKI Jakarta dalam menjawab permasalahan dan tantangan ekonomi yang dihadapi organisasi.

Penelitian ini dilakukan dalam mengkaji dan menganalisis peran dari PD PPM DKI Jakarta dalam mendorong kemandirian ekonomi dan peningkatan kesejahteraan Ekonomi Anggota serta mendorong eksistensi organisasi di tengah masyarakat.

KAJIAN PUSTAKA

EKSISTENSI SEBUAH ORGANISASI

Menurut Bakke (Kusdi, 2009) organisasi merupakan sebuah sistem yang berlangsung secara terus-menerus, terdiri dari berbagai aktivitas manusia yang terstruktur dan saling terkoordinasi. Dalam sistem ini, digunakan dan dipadukan elemen-elemen seperti manusia, bahan, modal, ide, serta sumber daya alam, untuk menciptakan suatu mekanisme pemecahan masalah yang khas. Tujuan dari proses ini adalah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia, yang terjadi melalui interaksi dengan sistem-sistem aktivitas lainnya serta berbagai sumber daya yang ada di sekitarnya.

Argyris (Fithriyyah, 2021) mendefinisikan organisasi merupakan suatu rancangan strategis yang dibentuk oleh sekelompok individu untuk mewujudkan beragam tujuan yang memerlukan kerja sama dan keterlibatan banyak orang. Armosudiro (Fithriyyah, 2021) menyatakan bahwa organisasi adalah suatu struktur yang mengatur pembagian tugas serta pola komunikasi kerja di antara sekelompok individu yang menempati posisi tertentu dan bekerja sama dengan cara-cara tertentu untuk mencapai tujuan bersama. Siagian (Fithriyyah, 2021) menyatakan bahwa organisasi merupakan setiap wujud persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara formal terkait dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang mana terdapat seseorang atau beberapa orang yang disebut atasan dan seorang atau sekelompok orang yang disebut dengan bawahan.

Oleh karena itu, organisasi dapat diartikan sebagai suatu bentuk sosial yang secara sadar dibentuk dan dikoordinasikan oleh sekelompok individu secara berkelanjutan, dengan tujuan untuk meraih sasaran-sasaran yang tidak mungkin dicapai secara individu.

Empat prinsip utama yang perlu dimiliki oleh suatu organisasi dikemukakan oleh Daft (Kartini, 2010) diantaranya :

- a. Organisasi merupakan suatu entitas sosial yang terdiri dari individu maupun kelompok manusia. Peran utama organisasi adalah sebagai wadah interaksi antar

manusia.

- b. Setiap organisasi selalu diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu, karena tujuan tersebut menjadi dasar utama keberadaannya. Tanpa tujuan yang dirumuskan dengan jelas, keberadaan organisasi kehilangan maknanya dan tidak memiliki alasan untuk dibentuk.
- c. Dalam organisasi terdapat sistem-sistem yang disusun dan dikoordinasikan secara logis dan terstruktur, guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tugas-tugas organisasi dibagi secara sistematis ke dalam berbagai bagian atau departemen, dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja.
- d. Organisasi memiliki batas-batas yang dapat diidentifikasi secara relatif jelas, yang menunjukkan unsur mana saja yang termasuk dalam organisasi dan mana yang berada di luar struktur organisasi tersebut.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Ejaan yang Disempurnakan), istilah eksistensi diartikan sebagai keberadaan atau adanya sesuatu. Sementara itu, menurut Wikipedia Ensiklopedia Bahasa Indonesia, kata eksistensi berasal dari bahasa Latin *existere* yang berarti muncul, hadir, ada, atau memiliki keberadaan secara nyata. Menurut Indrani (Rambalangi et al., 2018) eksistensi bisa kita kenal juga dengan satu kata yaitu keberadaan. Dimana keberadaan yang dimaksud adalah adanya pengaruh atas ada atau tidak adanya kita. Rini (Rambalangi et al., 2018) mengemukakan bahwa secara umum, eksistensi dapat diartikan sebagai suatu bentuk keberadaan.

Penelitian terkait eksistensi suatu organisasi telah dilakukan oleh Daeli (2012) yang menemukan banyaknya penyimpangan peran dari LSM dan sudah harus melakukan transformasi dalam mengembalikan peran serta tetap mempertahankan eksistensi organisasi di mata masyarakat.

Jadi eksistensi organisasi disini dimaksudkan keberadaan organisasi tersebut memiliki pengaruh terhadap lingkungan sekitar organisasi itu hadir. Eksistensi organisasi tidak hanya dilihat dari keberadaannya secara fisik atau administratif, tetapi juga dari sejauh mana organisasi tersebut memberikan dampak nyata bagi lingkungan sekitarnya. Organisasi yang eksis adalah yang mampu berperan aktif dalam menjawab kebutuhan, permasalahan, dan aspirasi masyarakat di sekitarnya. Pengaruh tersebut bisa berupa kegiatan sosial, pemberdayaan ekonomi, pendidikan, atau advokasi yang dirasakan manfaatnya oleh komunitas lokal. Ketika organisasi hadir dan berkontribusi positif, maka keberadaannya akan diakui dan dihargai. Sebaliknya, jika organisasi tidak memberi dampak apa-apa, keberadaannya akan dianggap tidak relevan dan mudah dilupakan.

PEMUDA PANCA MARGA

Pemuda Panca Marga (PPM) merupakan organisasi yang dibentuk berdasarkan keputusan Kongres IV Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) tahun 1978. Kongres tersebut menyepakati pembentukan sebuah wadah bagi putra-putri serta keturunan para Veteran Indonesia, yang kemudian dinamakan Pemuda Panca Marga mengambil nama dari **Pancamarga**, yang merupakan sumpah atau **kode etik LVRI**.

Veteran, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia Pasal 1, adalah warga negara Indonesia yang tergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui pemerintah dan ikut aktif

dalam peperangan melawan negara lain, gugur dalam membela kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau yang turut serta dalam misi perdamaian dunia di bawah naungan PBB, serta telah menerima Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia.

Pemberian izin untuk menggunakan nama **Pancamarga** menunjukkan bahwa **LVRI memberikan mandat resmi kepada PPM sebagai bagian dari struktur organisasinya**. PPM berdiri sebagai organisasi turunan atau anak organisasi dari LVRI. Hal ini diperkuat melalui Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1980 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga LVRI (Hasina & Satyadharma, 2023).

Sebagai tindak lanjut dari keputusan tersebut, diselenggarakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang menghasilkan pelantikan Pimpinan Pusat PPM Sementara pada 22 Januari 1981. Tugas utamanya adalah mendirikan markas daerah PPM di seluruh wilayah Indonesia dan menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) I.

Munas I PPM dilaksanakan pada tahun 1983 di Pandaan, Jawa Timur, dan menghasilkan pembentukan Pimpinan Pusat PPM secara resmi sebagai anak organisasi LVRI. Hubungan erat antara PPM dan LVRI terlihat jelas, bahkan dari penggunaan nama Pancamarga, yang mencerminkan sumpah para Veteran RI. Identitas ini juga tampak dalam kop surat resmi PPM, di mana nama LVRI tercantum di bagian atas, diikuti oleh nama Pemuda Panca Marga di bawahnya.

Hubungan PPM dengan LVRI bersifat sangat erat dan istimewa, mengingat LVRI berperan sebagai Dewan Pembina utama. Selain LVRI, unsur ABRI (sekarang TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia juga turut menjadi bagian dari Dewan Pembina. Hubungan inilah yang memberikan PPM kedudukan yang unik dan khas. Keanggotaan PPM pun terbatas hanya bagi putra-putri para Veteran Republik Indonesia.

PEMBERDAYAAN ANGGOTA

Menurut Ife (Martono, 2011), konsep pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai suatu proses yang bertujuan untuk membekali masyarakat dengan berbagai sumber daya, peluang, pengetahuan, dan keterampilan agar mereka mampu meningkatkan kapasitas diri dalam menentukan arah masa depan serta berperan aktif dan berpengaruh dalam kehidupan komunitasnya. Dengan kata lain, pemberdayaan masyarakat merupakan suatu upaya untuk meningkatkan martabat dan nilai kemanusiaan kelompok masyarakat, agar dapat terbebas dari jerat kemiskinan dan keterbelakangan. Tujuan utamanya adalah membentuk masyarakat yang mandiri melalui penciptaan kondisi yang mendukung pengembangan potensi yang ada dalam diri masyarakat itu sendiri. Dumsari (2014) menyatakan bahwa masyarakat memiliki peranan dalam upaya pemberdayaan dimana tujuan pemberdayaan diantaranya :

- a. Membebaskan masyarakat dari kemiskinan budaya dan kemiskinan yang bersifat absolut.
- b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan prinsip keadilan.
- c. Mengembangkan kemandirian dan kemampuan swadaya masyarakat yang lemah dan tidak berdaya.
- d. Meningkatkan status kesehatan masyarakat secara merata di seluruh lapisan.
- e. Memperluas akses pendidikan wajib sembilan tahun, bahkan hingga dua belas

- tahun, bagi setiap individu di desa maupun kota.
- f. Membebaskan masyarakat dari berbagai bentuk ketertinggalan, keterbelakangan, ketidakberdayaan, isolasi sosial, ketergantungan, serta kemerosotan moral.
 - g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai sektor kehidupan.
 - h. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
 - i. Meningkatkan kemauan dan kemampuan masyarakat berpartisipasi secara aktif dalam pengelolaan usaha produktif kreatif yang berbasis pada sumber daya lokal.
 - j. Mengurangi atau menghilangkan kecemasan dan kekhawatiran warga yang rentan terhadap ancaman kelangkaan pangan dan kegagalan panen.
 - k. Memperkuat daya saing masyarakat di pasar lokal, regional, nasional, bahkan internasional yang semakin kompetitif.
 - l. Mengurangi tingkat pengangguran.
 - m. Meningkatkan perlindungan hukum bagi warga dari lapisan bawah.
 - n. Meningkatkan jaminan sosial untuk warga miskin dan korban bencana alam.
 - o. Meningkatkan peluang kerja produktif yang berbasis pada ekonomi kerakyatan.
 - p. Mengembangkan fungsi kelembagaan lokal untuk pemberdayaan warga dari lapisan bawah.
 - q. Membangun masyarakat yang kreatif dan komunikatif dalam mengakses informasi pembangunan yang inovatif.
 - r. Meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak bergantung pada pihak donor atau pemberi bantuan.

KEMANDIRIAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN ANGGOTA

Istilah kemandirian juga dapat diartikan sebagai keadaan individu yang mampu berdiri sendiri dan tidak bergantung pada orang lain.

Dalam perspektif ekonomi, kemandirian ekonomi (economic independence) mengacu pada kemampuan individu, kelompok, atau negara untuk memenuhi kebutuhan ekonominya tanpa bergantung pada pihak lain. Ini berarti memiliki kemampuan untuk menghasilkan dan mengelola sumber daya ekonomi sendiri, serta memiliki kontrol atas keputusan ekonomi yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Menurut Priambodo (Djazimah, 2004), secara konseptual kemandirian ekonomi memiliki sejumlah indikator atau tolok ukur sebagai berikut:

- a. Seseorang dianggap mandiri secara ekonomi apabila ia memiliki usaha atau pekerjaan yang dikelola sendiri dan menghasilkan secara ekonomis.
- b. Kemandirian ekonomi juga tercermin dari rasa percaya diri yang dimiliki individu dalam menjalankan kegiatan usaha, seperti perdagangan, UMKM, industri rumahan, atau manajemen perusahaan.
- c. Tanda lain dari kemandirian ekonomi adalah ketika seseorang mampu menjalankan bisnis dalam jangka waktu yang panjang, yang pada akhirnya memberinya kekuatan modal untuk terus berkembang.
- d. Selain itu, kemandirian ekonomi juga tampak dari keberanian seseorang dalam mengambil risiko atau keluar dari zona nyaman, seperti memiliki visi besar dalam mengembangkan usahanya, berusaha keras untuk mewujudkan impian tersebut, berani mengajukan pinjaman modal usaha dengan perencanaan yang cermat dan realistis, serta berani mengambil keputusan cepat saat melihat peluang yang ada.

Liony dkk (Mokalu et al., 2021) menyatakan bahwa kesejahteraan dapat diartikan sebagai suatu tatanan kehidupan sosial yang mencakup aspek material dan spiritual, yang disertai dengan rasa aman, moralitas, dan ketenangan baik dalam diri individu, keluarga, maupun lingkungan masyarakat secara lahir dan batin. Kondisi ini memungkinkan setiap warga negara untuk berupaya memenuhi kebutuhan fisik, mental, dan sosialnya secara optimal, baik untuk dirinya sendiri, keluarganya, maupun masyarakat luas, dengan tetap menghormati hak asasi manusia.

Dengan demikian, kesejahteraan menjadi tolok ukur bahwa masyarakat telah mencapai kondisi hidup yang layak dan sejahtera.

Menurut Sunarti (2006), kesejahteraan merupakan suatu susunan kehidupan sosial yang mencakup aspek material dan spiritual, yang disertai dengan rasa aman, moralitas, serta ketenangan lahir dan batin. Kondisi ini memberikan kesempatan bagi setiap warga negara untuk berusaha memenuhi kebutuhan fisik, mental, dan sosial mereka secara optimal, baik untuk diri sendiri, keluarga, maupun masyarakat secara keseluruhan. Dari pernyataan ini dapat dipahami bahwa terdapat hubungan erat antara konsep kesejahteraan dan kebutuhan. Ketika berbagai kebutuhan seseorang terpenuhi, maka individu tersebut dapat dianggap telah mencapai kesejahteraan, karena tingkat pemenuhan kebutuhan tersebut secara tidak langsung mencerminkan indikator kesejahteraan. Di Indonesia kesejahteraan sosial sering dipandang sebagai tujuan atau kondisi kehidupan yang sejahtera, yakni terpenuhinya kebutuhan pokok manusia (Suharto, 2007).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang merupakan metode penelitian untuk menggambarkan permasalahan yang berkaitan dengan program, data, atau pengalaman yang dialami langsung oleh peneliti. Penelitian dilaksanakan di Provinsi DKI Jakarta dengan PD Pemuda Panca Marga sebagai objek utama selama satu bulan, yakni dari April hingga Mei 2025. Pemilihan informan dilakukan secara purposive, yaitu berdasarkan kriteria atau pertimbangan tertentu. Rincian mengenai informan yang terlibat dalam penelitian ini akan dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 1. Informan Penelitian

No	Nama Informan	Jabatan/ Instansi
1	Bambang	Kepala Bidang Ekonomi PD PPM DKI Jakarta
2	Dr. Rostoe	Kepala Bidang Antar Lembaga PD PPM DKI Jakarta
3	Sri Sembiring	Anggota Bidang Ekonomi PD PPM DKI Jakarta
4	Abdul Rahman	Bidang Ekonomi PD PPM DKI Jakarta
5	Mujiyanto	Anggota Bidang Antar Lembaga PD PPM DKI Jakarta

Sumber : Data Primer (2025)

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, serta studi dokumen. Untuk menganalisis data yang diperoleh, peneliti menerapkan model analisis data interaktif dari Miles dan Huberman, yang mencakup tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Setelah data terkumpul, dilakukan pemeriksaan terhadap

keabsahannya agar hasil yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Validitas data diuji melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, pengecekan oleh informan (member check), serta kecukupan referensi.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN.

GAMBARAN PD PPM DKI JAKARTA

PD PPM DKI Jakarta merupakan bagian dari organisasi Pemuda Panca Marga (PPM) yang dibentuk berdasarkan keputusan Kongres IV Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) tahun 1978.

Untuk tingkat Daerah DKI Jakarta, saat ini memiliki anggota sebanyak 689 orang dengan terbagi beberapa bidang atau divisi dalam kepengurusan dalam menjalankan roda organisasi. Seperti halnya organisasi lain untuk eksistensi dan keberadaan di tengah masyarakat, Pemuda Panca Marga Provinsi DKI Jakarta memiliki tujuan dan peran diantaranya

- a. Menjaga, melestarikan, dan mewariskan semangat juang 1945;
- b. Berkontribusi aktif dalam pembangunan nasional;
- c. Terlibat dalam sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata) sebagai bentuk

PENTINGNYA MEMBERDAYAKAN ANGGOTA DALAM KEMANDIRIAN EKONOMI SERTA EKSTISTENSI PEMUDA PANCA MARGA

Hasil temuan penelitian dari wawancara kepada para informan menemukan bahwa Pemuda Panca Marga DKI Jakarta saat ini berupaya mendorong dan memberdayakan anggota mereka terutama yang berada dalam situasi ekonomi yang kurang baik dan memprihatinkan.

Peran penting dari organisasi terhadap pemberdayaan anggota dalam kemandirian ekonomi anggota dan instansi serta peningkatan kesejahteraan itu diyakini menjadi salah satu merupakan fondasi penting dalam menjaga dan memperkuat eksistensi Pemuda Panca Marga DKI Jakarta tidak hanya bagi anggotanya maupun lingkungan masyarakat sekitarnya.

Hasil wawancara pada para informan penelitian menemukan bahwa jajaran PD PPM DKI Jakarta meyakini bahwa ketika anggota organisasi dan PPM itu sendiri sudah mandiri secara ekonomi, maka kehidupan ekonomi anggota dan jalannya roda organisasi itu tidak selalu bergantung pada donasi pihak lain, sehingga baik anggota bisa lebih berpartisipasi dalam jalannya roda PPM itu sendiri serta PPM juga mampu menjalankan semua agenda dan program kegiatannya.

Pentingnya memandirikan anggota dan mendorong ke tingkat sejahtera juga akan berdampak pada eksistensi organisasi dikarenakan anggota yang mandiri secara ekonomi tentu akan memiliki lebih banyak waktu, tenaga dan pikiran dalam membuat PPM DKI Jakarta menjadi lebih hidup dan berkontribusi bagi masyarakat serta mendorong eksistensi organisasi.

Pemberdayaan ekonomi anggota ini dimulai dari kesadaran bahwa jalannya organisasi membutuhkan anggaran dan dana yang sudah harus mulai dirubah perspektifnya, sehingga Bidang Ekonomi menjadi jauh lebih diberdayakan dan

dioptimalkan dalam rangka membentuk kemandirian ekonomi tidak hanya bagi anggota namun juga organisasi.

Hal itu dapat dilihat dengan pendirian Koperasi Usaha yang diberi nama Koperasi Resimen IX yang merupakan suatu upaya PD PPM DKI Jakarta merangkul potensi usaha dan kegiatan ekonomi yang dapat dilakukan oleh setiap anggota dan harus dirangkul dan difasilitasi oleh organisasi dalam rangka meningkatkan tingkat kesejahteraan anggota. Upaya yang sudah dilakukan oleh Koperasi Resimen IX adalah melakukan pelatihan keterampilan usaha pada anggota serta mengembangkan jejaring sosial dan pasar dalam membantu memasarkan produk-produk yang sudah dihasilkan oleh anggota.



Gambar 1. Undangan Seminar dan Talks Show Digital Marketing PD PPM DKI Jakarta

Sumber : PD PPM DKI Jakarta (2025)



Gambar 2. Kegiatan Seminar dan Talks Show Digital Marketing PD PPM DKI Jakarta

Sumber : PD PPM DKI Jakarta (2025)

Peresmian produk-produk Koperasi Resimen IX PD PPM DKI Jakarta **secara resmi** telah dilakukan pada Pertengahan Bulan Mei 2025 bertepatan dengan kegiatan Sosialisasi yang dilakukan di Makodim 0501 DKI Jakarta.

Adapun beberapa produk-produk yang sudah difasilitasi oleh Koperasi Resimen IX terurai dalam gambar berikut



Gambar 3. Produk Kopi Koperasi Resimen IX PPM DKI Jakarta

Sumber : PD PPM DKI Jakarta (2025)



Gambar 4. Produk Sabun Koperasi Resimen IX PPM DKI Jakarta

Sumber : PD PPM DKI Jakarta (2025)

Para informan penelitian meyakini bahwa ketika potensi ekonomi anggota dioptimalkan, hal itu tidak hanya meningkatkan kesejahteraan individu, tetapi juga menjadikan mereka sebagai kekuatan yang menopang organisasi. Anggota yang produktif akan lebih loyal, aktif, dan mampu mendukung keberlanjutan serta pengaruh organisasi di masyarakat.

Ketergantungan terhadap bantuan eksternal atau donatur dapat dikurangi, sehingga diharapkan PD PPM DKI Jakarta lebih independen dan berdaulat dalam mengambil keputusan. Keberadaan anggota yang berdaya juga memberikan citra

positif terhadap Pemuda Panca Marga, yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan publik dan menarik minat anak cucu veteran (Ancuвет) khususnya yang masih tergolong generasi muda untuk bergabung dan berpartisipasi pada organisasi ini.

Temuan penelitian ini sejalan dengan temuan penelitian yang telah dilakukan oleh Budiandrian et al. (2022) yang menyimpulkan besarnya peranan suatu organisasi (dalam hal ini organisasi petani) dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi ekonomi keluarga petani di Indonesia.

Terkait pemberdayaan yang dilakukan oleh suatu komunitas atau organisasi juga ditegaskan dalam penelitian yang dilakukan oleh Maisaroh et al. (2025) yang menyatakan besarnya peran organisasi Islam Wanita di Kota Serang dalam memberdayakan para wanita dalam kemandirian ekonomi dan mendorong peningkatan kesejahteraan anggotanya.

Tantangan yang dihadapi oleh banyak organisasi saat ini adalah lemahnya kemandirian secara ekonomi dan adanya kecenderungan tergantung pada kemampuan finansial seorang ketua ataupun bantuan donasi dari pihak lain. Karena alasan dana dan anggaran operasional itu juga mendorong banyak organisasi **diduga atau disinyalir** terlibat dalam praktik-praktik premanisme yang saat ini menjadi **stigma negatif terhadap keberadaan organisasi di tengah masyarakat.**

Temuan penelitian ini sejalan dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh Agustina et al. (2021) yang meyakini bahwa perlunya penguatan dilakukan oleh organisasi dalam mendorong jiwa kewirausahaan dan potensi ekonomi anggota sehingga berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan ekonomi anggota.

Organisasi juga berperan sangat besar dalam pemberdayaan ekonomi anggotanya sebagaimana temuan penelitian yang dilakukan oleh Rahman et al. (2023) dengan beberapa upaya seperti memobilisasi masyarakat, mengadvokasi kebijakan dan memberikan layanan yang diperlukan oleh masyarakat. Beberapa upaya tersebut diyakini akan berimplikasi pada besarnya peranan yang dimiliki oleh suatu organisasi dalam berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Upaya yang dilakukan oleh PD PPM DKI Jakarta ini memiliki makna ganda, selain sebagai upaya memandirikan anggota dan organisasi dari bantuan pihak lain secara terus menerus, upaya ini adalah bagian dari mempertahankan eksistensi organisasi di tengah masyarakat.

Hal ini juga untuk memvalidasi bahwa Pemuda Panca Marga sebagai organisasi anak keturunan Veteran dan Pejuang yang memiliki niat luhur dalam pendiriannya dan menjaga bangsa ini seperti halnya organisasi Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) yang tumbuh dan hadir dalam setiap jejak sejarah bangsa ini, yang tentu berbeda dengan sejarah lahirnya organisasi lain (Satyadharma & Erfain, 2022).

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa PD Pemuda Panca Marga DKI Jakarta memainkan peran penting dalam mendorong kemandirian ekonomi serta peningkatan kesejahteraan anggotanya. Melalui berbagai program pemberdayaan ekonomi dengan pendirian Koperasi Resimen IX dalam memberikan pelatihan keterampilan, dan pengembangan jejaring sosial dalam memasarkan produk anggota, organisasi ini berupaya memandirikan secara ekonomi anggota dan diharapkan

berdampak pada peningkatan kesejahteraan anggota. Kemandirian finansial dan ekonomi anggota akan mendorong kemandirian secara finansial organisasi serta menciptakan eksistensi PPM DKI Jakarta di tengah masyarakat.

Untuk itu, disarankan agar upaya ini dapat dicontoh oleh PD PPM di daerah lain dalam berperan memberdayakan anggota untuk kemandirian secara individu dan berimplikasi terhadap kemandirian organisasi serta eksistensi di tengah masyarakat. Selain itu secara jangka panjang mampu merubah stigma negatif terkait organisasi yang saat ini lagi tren terkait indikasi organisasi dekat dan terindikasi pencarian anggaran organisasi dengan cara-cara premanisme.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, T., Rezti, R., Nurdin, M., Sampurnawati, S., Suryani, S., Jatmika, D., & Ardianto, Y. A. (2021). Penguatan Jiwa Kewirausahaan Melalui Kesadaran Potensi Diri Anggota Bumdes Berkah Bersama Desa Karang Bunga Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala. *Indonesian Collaboration Journal of Community Services (ICJCS)*, 1(3), 77–89.
- Ariyanto. (2011). *Teori Organisasi dan Administrasi*. Salemba Humanika.
- Budiandrian, B., Azzahra, F., & Setyadi, A. (2022). Peran Organisasi Petani dalam Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Petani di Indonesia. *Jurnal Agrimanex: Agribusiness, Rural Management, and Development Extension*, 2(2), 123–134.
- Daeli, S. P. (2012). Eksistensi Lembaga Swadaya Masyarakat di Kalimantan Barat. *Jurnal Bina Praja*, 4(1), 57–66.
- Djazimah, S. (2004). Potensi Ekonomi Pesantren. *Jurnal Penelitian Agama*, 427.
- Dumsari. (2014). *Dinamika Pengembangan Masyarakat Partisipatif*. Pustaka Pelajar.
- Fithriyyah, M. U. (2021). *Dasar-Dasar Teori Organisasi*. Irdev.
- Hasina, H., & Satyadharma, M. (2023). Peran Pemimpin dalam Pencapaian Tujuan Organisasi: Studi Pada DPD Pemuda Panca Marga Provinsi Sulawesi Tenggara. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 3(1), 25–34. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v3i1.175>
- Kartini, D. (2010). *Manajemen Strategik Keorganisasian Publik*. PT. Refika Aditama.
- Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1980 Tentang Pengesahan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga LVRI.
- Kusdi. (2009). *Teori Organisasi dan Administrasi*. Salemba Humanika.
- Maisaroh, I., Mahpudin, M., & Stiawati, T. (2025). Pemberdayaan Perempuan Melalui Ormas Islam Wanita di Kota Serang. *Jurnal Praksis Dan Dedikasi Sosial*, 8(1), 1–18.
- Martono, N. (2011). *Sosiologi Perubahan Sosial: Perspektif Klasik Modern, Postmodern dan Poskolonial*. Rajawali Press.
- Masduki, M. (2023). Organisasi Jurnalis dan Kebebasan Pers di Yogyakarta. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 20(1), 1–20.
- Mokalu, T. M., Nayoan, H., & Sampe, S. (2021). Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Pasar Tradisional Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus di Pasar Langowan Timur Kecamatan Langowan Timur).

Governance, 1(2).

- Pujiastuti, N. S., Watie, E. D. S., & Pramucitra, S. (2022). Pelatihan Optimalisasi Sosial Media untuk Membangun Reputasi Positif Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Kota Semarang. *Jurnal Pengabdian Mandiri*, 1(6), 1007–1010.
- Rahman, A., Wasistiono, S., Riyani, O., & Tahir, I. (2023). Peran Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 7(2), 1461–1471.
- Rambalangi, R., Sambiran, S., & Kasenda, V. (2018). Eksistensi Lembaga Adat dalam Pembangunan Kecamatan Tawalian Kabupaten Mamasa (Suatu Studi di Kecamatan Tawalian Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat). *Jurnal Eksekutif*, 1(1).
- Reksohadiprodjo, S., & Handoko, H. (2001). *Organisasi Perusahaan: Teori Struktur dan Perilaku*. BPFE UGM.
- Satyadharma, M., & Erfain. (2022). Peran Veteran dalam Meningkatkan Semangat Nasionalisme Pada Masyarakat: Studi pada DPD LVRi Sulawesi Tenggara. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 2(2), 117–127. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v2i2.85>
- Suharto, E. (2007). *Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Sunarti, E. (2006). *Indikator Keluarga Sejahtera: Sejarah Pengembangan, Evaluasi, dan Keberlanjutannya*. Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Veteran Republik Indonesia.
- Walidain, A. B. (2021). *GP Ansor dalam Pengembangan Karakter Kebangsaan*. Guepedia.